

**EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA ERA PANDEMI COVID 19
DI KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA**

Skripsi

*diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*



Oleh:

NAMA : NADILA HARFAYANTI

NPM : 1605180039

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : NADILA HARFAYANTI
NPM : 1605180039
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA ERA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE., M.Si)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, SE, M.Si)

Pembimbing

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

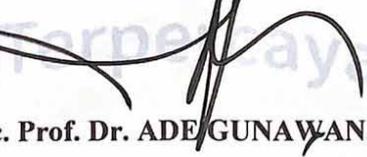
Panitia Ujian

Ketua



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NADILA HARFAYANTI
NPM : 1605180039
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA ERA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

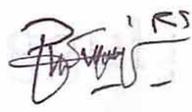
Medan, Mei 2023

Pembimbing Skripsi


Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.


Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


Dr. TANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : NADILA HARFAYANTI
N.P.M : 1605180039
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. CIK NONI
Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA ERA PANDEMI
COVID 19 DI KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI
SUMATERA UTARA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
18/3-2023	- ACC / revisi proposal. - Ambil data - Bonat kupa lulu buku.		
20/5-2023	ACC Skripsi utg sidang muf taji		

Pembimbing Skripsi

Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si

Medan, Mei 2023
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADILA HARFAYANTI
NPM : 1605180039
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Kosentrasi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
**Judul Skripsi : EVALUASI KEBIJAKAN DANA DESA PADA ERA PANDEMI
COVID 19 DI KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



NADILA HARFAYANTI

ABSTRACT

The purpose of this study was to carry out a descriptive economic analysis of the development of village funds, the distribution and use of village funds in villages in Bilah Hulu and Bilah Barat districts and the development of village IPD and IDM in Labuhan Batu district after the village fund policy. This research uses the basic method used in this study is to use descriptive research. The results of this study indicate that the development of Village Funds in Labuhan Batu Regency has experienced fluctuating developments since 2018 – 2021. The allocation and use of Village Funds in Labuhan Batu Regency such as in the villages of N-8 Aek Nabara, S-1 Aek Nabara and Aek Buru Selatang focus village fund budget on the allocation of covid-19 and BLT village funds. Labuhan Batu Regency from 2018 to 2022 the status of the Developing Village Index (IDM) is in the Developing status. In the aspect of the Village Development Index (IPD) of Labuhan Batu district, North Sumatra in 2014 it reached a value of 60.34 and in 2018 it increased to 64.16.

Keywords: Labuhan Batu, Village Fund, IPD & IDM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan dana desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa pada Kecamatan Bilah Hulu dan Bilah Barat dan perkembangan IPD dan IDM desa di Kabupaten Labuhan Batu setelah Kebijakan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan Dana Desa di Kabupaten Labuhan Batu mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2018 – 2021. Pengalokasian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Labuhan Batu seperti pada desa N-8 Aek Nabara, S-1 Aek Nabara dan Aek Buru Selatang memfokuskan anggaran dana desa pada alokasi covid-19 dan BLT dana desa. Kabupaten Labuhan Batu sejak tahun 2018 hingga 2022 status Indeks Desa Membangun (IDM) berada pada status Berkembang. Pada aspek Indeks Pembangunan Desa (IPD) kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai nilai 60,34 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 64,16.

Kata Kunci : Labuhan Batu, Dana Desa, IPD & IDM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala Puji dan syukur, hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala doa dan harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keridhaan- Nyalah Penulis memiliki kemauan, kemampuan dan kesempatan dan kemudahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kedua orangtua yang saya cintai, Ayahanda **ZULIANTO** dan Ibunda **SITI FATIMAH** yang memberi motivasi, dukungan, semangat, dan do'a.

Terimakasih atas segalanya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Ayahanda dan Ibunda. Aminyarabbal'alamin, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus terhadap penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini dan juga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si** selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Dra. Roswita Hafni, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Dra. Roswita Hafni, M.Si** selaku dosen pembimbing telah mengarahkan dan membina sehingga dapat tersusunnya proposal skripsi ini.
8. Seluruh Dosen, Pegawai beserta Staff Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini berupa waktu maupun motivasi.
9. Kepada sahabat-sahabat baik penulis Hetty Herawati Srg,Sopiah Yuni Nst,Wilda Farida Hs,Fanni Khoiriyyah,Luthfi Tania Saragih,Risma Safitri,Febrieza Purnama Sundari,Arika Yunita,Elysia Winona Marpaung, yang telah memberikan dukungan hingga proposal ini selesai dengan baik.
10. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Ekonomi Pembangunan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan.Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat ,manambah

pengetahuan bagi kita semua, *Aamiin...ya Rabbal Alaamiin...*
Wassalamu`alaikumwarahmatullahi wabarakatuh.

Medan, Mei 2023

Nadila Harfayani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	13
1.3. Batasan Masalah.....	14
1.4. Rumusan Masalah	14
1.5. Tujuan	14
1.6. Manfaat	15
1.6.1. Akademik	15
1.6.2. Non Akademik	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Landasan Teoritis.....	17
2.1.1. Teori Pembangunan Ekonomi	17
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	32
2.1.3. Pengeluaran Pemerintah	39
2.1.4. Regulasi	42
2.1.3.1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	44
2.1.3.2. Penggunaan Dana Desa.....	45
2.1.3.3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)	47
2.1.3.4. Padat Karya Tunai Desa (PKTD).....	48
2.2. Penelitian Terdahulu	50

2.3. Kerangka Konseptual.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. Pendekatan Penelitian	52
3.2. Definisi Operasional.....	52
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian	53
3.3.1. Tempat Penelitian.....	53
3.3.2. Waktu Penelitian	53
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	53
3.4.1. Jenis Data	53
3.4.2. Sumber Data.....	53
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.6. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu	56
4.1.1. Kondisi Geografis	56
4.1.2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	57
4.1.3. Kondisi Ekonomi.....	60
4.2. Analisis Penelitian	61
4.2.1. Perkembangan dana desa kabupaten Labuhanbatu	61
4.2.2. Penggunaan dan alokasi dana desa era pandemic covid-19	63
4.2.3. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Labuhan Batu	66
4.2.3.1. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Labuhan Batu	66

4.2.3.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada Kabupaten Labuhan Batu	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	3
Tabel 1 2 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2020*	4
Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2015-2019.....	6
Tabel 1 4 Dana desa di Indonesia Tahun 2016-2020	11
Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	50
Tabel 3 1 Definisi Operasional	53
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu	57
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2021	58
Tabel 4.3 Jenis Kegiatan Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021	58
Tabel 4.4 Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2021	59
Tabel 4.5 PDRB 17 Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) (Milyar Rupiah)	60
Tabel 4.6 Perkembangan Dana Desa Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018 - 2022	61
Tabel 4.7 Alokasi Dana Desa per-Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu	62
Tabel 4.8 Penyaluran Dana Desa di Desa Kabupaten Labuhan Batu 2022	64
Tabel 4.9 Perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018 - 2022	68
Tabel 4.10 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2014 dan 2018.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial Penanganan Dampak.....	9
Gambar 2 1 Kerangka konseptual	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Virus SARS-CoV-19 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2020. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di Kota Wuhan, tempat klaster pertama infeksi Covid-19 tercatat. Selama beberapa bulan terakhir, para ilmuwan telah mencapai konsensus luas bahwa virus menyebar sebagai akibat dari "*zoonotic spillover*" atau "virus yang melompat" dari hewan yang terinfeksi ke manusia, sebelum menjadi sangat menular dari manusia ke manusia. Namun, teori lain yakin bahwa virus tersebut mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama, yang terletak relatif dekat dengan pasar, yakni Institut Virologi Wuhan (WIV). Di tempat itu, para ilmuwan sudah mempelajari virus corona pada kelelawar selama lebih dari satu dekade. Di Asia Tenggara, 6 negara telah mengonfirmasi adanya virus tersebut. Keenam negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Sejauh ini, virus corona telah menginfeksi 28.209 orang dan menyebabkan 565 orang meninggal dunia.

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari penyakit yang disebabkan oleh korona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai Provinsi paling terpapar SARS-CoV-19 di Indonesia. Sampai tanggal 28 September 2021, Indonesia telah melaporkan 4.211.460 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di

Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 141.709 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala Covid-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 4.031.099 orang telah sembuh, menyisakan 38.652 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 25.757.177 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 95.537 orang per satu juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021. Menandai mulainya program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Dampak Virus COVID-19 di Indonesia tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, tetapi sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia:

- Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan.
- Jemaah Indonesia batal berangkat umrah.
- Kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia menurun.
- Merusak tatanan ekonomi di Indonesia.
- Impor barang menjadi terhambat.

Sejumlah negara di dunia telah mengalami resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut terjadi setelah pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I dan II 2020 menjadi minus. Beberapa negara yang mengalami resesi

ekonomi antara lain Singapura, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Perancis, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Indonesia akan mengalami resesi ekonomi jika pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III juga negatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2020 menjadi negatif (-5,32%). Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2020 tercatat mencapai 2,97% atau mulai menunjukkan adanya perlambatan.

Tabel 1 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	2022	2021	2020	2019	2018
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.31	3.70	-2.07	5.02	5.1

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perekonomian indonesia tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dimana, pada tahun 2018 yaitu sebesar pertumbuhan PDB sebesar 5.1% ditahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5.01% dan pada tahun 2020 akibat pandemic covid-19 menyentuh angka -2.07%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai membaik sejak 2021 dimana pertumbuhan menjadi 3.70% dan 5.31% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi ini terjadi dikarenakan selama masa krisis virus covid-19 diberlakukan nya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di seluruh Indonesia, dan hal ini mengharuskan seluruh masyarakat melakukan seluruh aktifitas dilakukan dirumah secara online atau daring atau yang biasa disebut dengan Work From Home (WFH).

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian

masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Tabel 1 2 Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2020*

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020*
Aceh	678.29	663.03	668.14	643.79	641.01
Sumatera Utara	762.21	663.30	605.02	595.04	587.54
Sumatera Barat	257	245.41	227.66	222.51	216.11
Riau	337.47	319.41	322.05	314.06	308.23
Jambi	174.48	160.11	164.97	158.20	154.16
Sumatera Selatan	718.62	707.04	689.85	688.31	693.78
Bengkulu	227.53	205.47	206.80	204.49	204.03
Lampung	912.34	871.77	861.40	816.79	812.22
Kep.Bangka Belitung	51.70	53.16	47.71	42.75	42.87
Kep.Riau	32.95	31.66	26.90	23.52	23.11
Dki Jakarta	0	-	-	-	-
Jawa Barat	1 624.81	1 383.18	1 203.08	1 110.15	1 194.33
Jawa Tengah	2 614.20	2 381.92	2 157.86	2 077.15	2 175.25
Di. Yogyakarta	187.58	167.94	151.78	142.15	149.59
Jawa Timur	3 085.76	2 949.82	2 834.05	2 617.85	2 736.97
Banten	277.58	284.16	286.60	270.13	303.14
Bali	81.20	80.40	69.89	65.79	64.82
Nusa Tenggara Barat	407.75	379.57	360.50	340.63	345.45
Nusa Tenggara Timur	1 037.60	1 015.70	1 020.05	1 020.84	1 040.37
Kalimantan Barat	314.34	304.92	290.37	288.19	282.41
Kalimantan Tengah	96.85	89.55	88.32	84.24	81.66
Kalimantan Selatan	123.26	128.35	124.33	120.43	114.78
Kalimantan Timur	121.60	116.28	114.05	112.75	116.99
Kalimantan Utara	29.78	26.75	26.99	26.55	28.43
Sulawesi Utara	140.62	134.90	126.93	123.70	123.57
Sulawasi Tengah	337.25	341.72	329.65	322.57	318
Sulawesi Selatan	646.21	659.47	610.94	597.19	603.03
Sulawesi Tenggara	274.11	245.19	231.80	227.38	224.89
Gorontalo	179.67	179.68	166.41	164.38	164.67
Sulawesi Barat	121.83	119.45	121.38	121.05	120.34

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020*
Maluku	277.55	272.59	270.92	271.37	268.30
Maluku Utara	63.95	65.35	67.03	71.80	69.79
Papua Barat	203.49	193.83	192.42	185.34	184.49
Papua	879.10	869.36	877.44	857.02	867.74
INDONESIA	17278.68	16310.44	15543.31	14928.12	15262.06

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2016-2020*, di Sumatera Utara pada tahun 2017 mengalami penurunan. Sumatera Utara menurun dari 762,21 pada tahun 2016 menjadi 663,30 pada tahun 2017. Selama periode tersebut angka kemiskinan di Sumatera Utara turun sebanyak 0,87 persen pertahun. Tingkat kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2016-2020* menurun sekitar 1,1 persen.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia Indonesia adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang makin kuat akan tidaknya terhindarnya keikutsertaan bangsa Indonesia dalam proses global yang sedang berlangsung.

Minimal ada empat kebijaksanaan pokok dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM), yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat,

2. Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya,
3. Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai iptek yang berwawasan lingkungan, serta
4. Pengembangan pranata yang meliputi kelembagaan dan peran hukum yang mendukung upaya peningkatan kualitas SDM.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2018-2022

Periode (Tahun)	Nilai
2018	71.39
2019	71.92
2020	71.94
2021	72.29
2022	72.91

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Indeks pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Indonesia meningkat dari 71,39 pada tahun 2018 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun dan meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi” mulai tahun 2016. Pada periode 2018–2019, IPM Indonesia tumbuh 0,74 persen.

Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

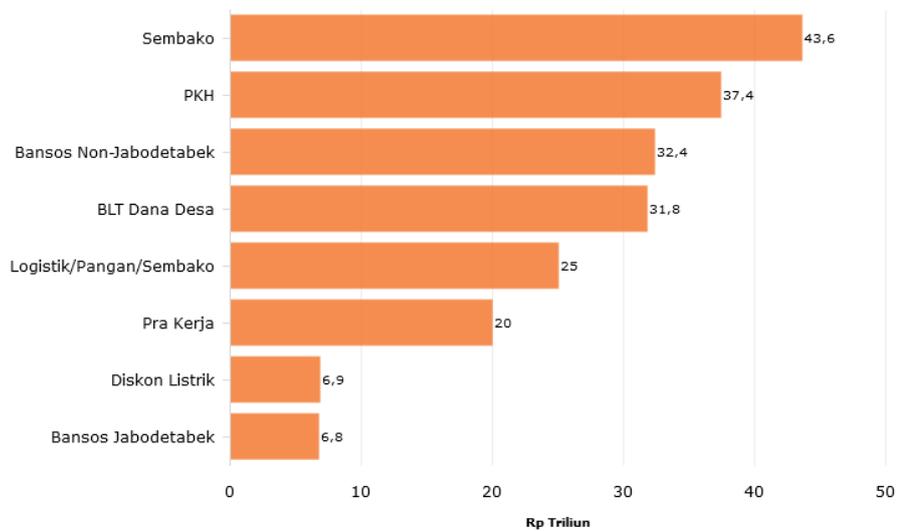
Namun kekurangan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.

- Desentralisasi akan lebih mampu menyelesaikan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada masyarakat yang

memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

- Pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik.

Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer ke Daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran untuk tiap jenis Transfer ke Daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. DASAR HUKUM 1. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 3. PMK Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.



Sumber: Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id)

Gambar 1 1 Alokasi Anggaran Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial penanganan covid-19 tahun 2020 dengan pembagian sembako sebesar 43,6 triliun rupiah, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 37,4 Triliun Rupiah, bansos no-jabodetabek yaitu 32,4 Triliun Rupiah, pemerintah juga memberikan anggaran untuk logistik atau pangan sebesar 25 Triliun Rupiah, kartu prakerja 20 Triliun Rupiah, diskon listrik 6,9 Triliun Rupiah, dan untuk bansos jabodetabek 6,8 Triliun Rupiah, alokasi anggaran penanganan covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar 31,8 Triliun Rupiah dimana anggaran ini disalurkan kepada masyarakat desa.

Daerah yang mengalami kenaikan alokasi TKDD baik dalam segi jumlah dan persentase, tentunya akan merasa senang karena akan memiliki anggaran lebih banyak untuk dapat dibelanjakan untuk pelayanan kepada masyarakatnya. Namun sebaliknya, ada daerah yang merasa mengalami ketidakadilan dalam penentuan alokasi tersebut karena jumlahnya tidak sesuai yang diinginkan. Hal tersebut sangatlah wajar karena masih banyak yang belum memahami secara baik

terkait pengalokasian TKDD dan daerah hanya memikirkan daerahnya sendiri tanpa melihat secara menyeluruh.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana 07/2012 yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dasar hukum DAK sendiri ialah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 Tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.

Dana alokasi umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Dana bagi hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana desa di definisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat . Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- Alokasi dasar
- Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. dengan adanya dana desa , desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera.

Tabel 1.4 Perkembangan Dana desa di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah (triliun)
2017	59,8
2018	59,9
2019	69,8
2020	71,2
2021	72,0
2022	68,0

Sumber : Kementerian keuangan Indonesia (kemenkeu)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa anggaran dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 anggaran desa hanya sebesar 20,8 triliun rupiah, mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 59,9 triliun dan 2019 sebesar 69,8 triliun rupiah hingga pada tahun 2021 diketahui total anggaran dana desa mencapai 72 triliun rupiah untuk seluruh desa yang ada di Indonesia. Namun, pada tahun 2022 anggaran dana desa mengalami penurunan menjadi 68 triliun.

Pembangunan Desa menjadi bagian penting yang menjadi target pembangunan nasional. Pembangunan desa merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dan pembangunan memiliki arti dan peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam melihat perkembangan wilayah desa ada dua indikator yaitu, IDM (Indeks Membangun Desa) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD).

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2022 desa dengan kategori desa mandiri sudah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2024). Berdasarkan data IDM tahun 2022, desa dengan status mandiri mencapai 6.238 desa, dengan target 5.000 desa mandiri pada tahun 2021. Sedangkan pada kategori desa sangat tertinggal pada tahun 2022 tercatat berkurang 8.471 desa, dari 13.453 desa menjadi 4.982 desa. Untuk kategori tertinggal berkurang 24.008, dari 33.592 desa menjadi 9.584 desa. Kategori desa berkembang bertambah 11.020 desa, dari 22.882 desa menjadi 33.902 desa. Sedangkan kategori desa maju bertambah 16.641 desa, dari 3.608 desa menjadi 20.249 desa dan pada kategori desa mandiri bertambah 6.064 desa, dari 174 desa menjadi 6.238 desa.

Secara nasional, tahap perkembangan desa di Indonesia dalam kategori desa berkembang dengan nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebesar 59,36. Hasil rata-rata indeks pada tingkat pulau menunjukkan ada tiga pulau yang memiliki nilai indeks di atas rata-rata Indeks Pembangunan Desa nasional (59,36). Ketiga pulau tersebut adalah pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa-Bali. Sementara

empat pulau lain berada di bawah rata-rata nasional yaitu Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Nilai IPD paling besar terdapat di Pulau Jawa-Bali (67,82). Sementara indeks paling rendah terdapat di Pulau Papua (35,57). Dilihat dari tingkat perkembangannya, 73,40 persen desa di Indonesia pada umumnya termasuk dalam kategori desa berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian besar pulau yang rata-rata indeksinya masuk dalam kategori desa berkembang. Pulau-pulau tersebut antara lain: Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sementara Pulau Papua rata-rata perkembangan desanya masih dalam kategori desa tertinggal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang” *Evaluasi Kebijakan Dana Desa pada era Pandemi Covid19 di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara*”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah ,terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu :

1. Diawal kemunculan Virus Covid 19 beberapa Negara di Asia Tenggara sudah mengkonfirmasi adanya virus tersebut yaitu Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina.
2. Dampak Virus Covid 19 di Indonesia , tidak hanya merugikan dari segi Kesehatan tetapi berdampak pada perekonomian.
3. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan perkembangan pembangunan nasional.

4. Bagaimana upaya pemerintahan mengontrol desentralisasi pada otonomi daerah ?
5. Daerah yang mengalami kenaikan alokasi TKDD memiliki anggaran lebih untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat.
6. Dana desa di Indonesia setiap tahun nya mengalami kenaikan dan juga penurunan
7. Dana desa bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memperdayakan desa untuk menciptakan pembangunan dan menuju masyarakat yang Adil,Makmur,dan Sejahtera.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini dibatasi dengan *Kebijakan Dana Desa Pada Era Pandemi Covid-19 di Kecamatan Rantau Utara.*

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Labuhan Batu?
2. Bagaimana Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa pada Kecamatan Bilah Hulu dan Bilah Barat?
3. Bagaimana perkembangan IPD dan IDM desa di Kabupaten Labuhan Batu setelah Kebijakan Dana Desa?

1.5 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah diatas,maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan dana desa di Kabupaten Labuhan Batu.
2. Melakukan analisis deskriptif tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Desa pada Kecamatan Bilah Hulu dan Bilah Barat.
3. Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan IPD dan IDM desa di Kabupaten Labuhan Batu setelah Kebijakan dana desa.

1.6 Manfaat

1.6.1 Akademik

1. Bagi penulis, hasil penelitian dijadikan masukan yang sangat bermanfaat untuk mengetahui bagaimana analisis pemerintah mengenai kebijakan dana desa pada masa sebelum dan sesudah Covid 19.
2. Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan untuk kajian yang lebih luas lagi untuk menyempurnakan penelitian tentang analisis kebijakan dana desa pada era pandemic Covid 19 di Kabupaten Labuhan Batu.

1.6.2 Non Akademik

Untuk pemerintahan, hasil penelitian ini agar bisa dijadikan masukan pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi, terutama yang berkaitan tentang dana desa di masa pandemic covid 19.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004) dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran 14 melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering

dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

A. Aliran Klasik

1. Adam Smith

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka

secara *agregat*. Smith pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan

pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat komulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus menerus. Di lain pihak naiknya produktivitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena Sumber Daya Alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan.

Kelemahan Teori Adam Smith

- a. Pengabaian masyarakat secara luas
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

a. David Ricardo

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja

dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitalis-kapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

2. Thomas Robert Malthus

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keternbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan

internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

3. Teori Karl Marx

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahapan-tahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubungan-hubungan produksi.

1. Menurutnyanya berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap :
2. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
3. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik factor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dsb. Karena murah nya harga buruh maka minat pemilik factor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.
4. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki factor produksi utama yaitu tanah.. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini

mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sector pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya system fiodal. Kelas borjuis yang memilki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tariff serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum fiodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini

5. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada pemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh . Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas
6. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.
7. Marx meramalkan keruntuhan system kapitalis, menurutnya terjadi karena adanya :

- a. Akumulasi yang menyebabkan perbedaan kaya miskin semakin lebar
- b. Kesengsaraan, karena kemiskinan semakin luas
- c. Krisis, karena daya beli masyarakat semakin berkurang karena pendapatan buruh semakin berkurang, sehingga terjadilah kelebihan produksi atas konsumsi (over production). Harga barang-barang merosot dan produksi terpaksa ditahan.
- d. Konsentrasi, penggabungan perusahaan-perusahaan agar tidak bangkrut karena persaingan dalam masyarakat kapitalis

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

B. Aliran Kontrarevolusi Neo-klasik / Fundamintalisme Pasar

Menurut teori ini pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 faktor : kenaikan kuantitas & kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi), serta penyempurnaan teknologi.

1. Aliran Neo-Klasik

Aliran yang menggantikan aliran klasik. Aliran ini mempelajari tingkat bunga (harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini dan yang akan datang). Neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut:

a. Akumulasi Kapital

Menurut Neo-klasik tingkat bunga dan tingkat pendapatan meningkatkan tingkat tabungan. Pada suatu tingkat teknik tertentu bunga menentukan tingkat investasi. Perubahan teknologi menurut Neo-klasik terutama adalah penemuan-penemuan baru yang mengurangi penggunaan tenaga buruh/ relative lebih bersifat “penghemat buruh” dari pada “penghemat capital”. Jadi kemajuan-kemajuan teknik akan menciptakan permintaan-permintaan yang kuat akan barang-barang capital.

b. Perkembangan sebagai proses Gradual / terus-menerus

Menurut Alfred Marshall bahwa perekonomian sebagai suatu kehidupan organic yang tumbuh dan berkembang perlahan-lahan sebagai proses yang gradual atau terus-menerus.

c. Perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif

Proses yang harmonis & kumulatif ini meliputi berbagai factor dimana factor itu tumbuh bersama-sama. Misal, bila teknik produksi baru yang akan menaikkan produksi total / akan menaikkan pendapatan total dimana untuk menambah produksi dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan lebih pandai, sehingga ada kenaikan permintaan terhadap produksi itu, karena kenaikan pendapatan Marshall menggambarkan pula harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal economies & external economies. Internal Economies timbul dari adanya mesin-mesin yang lebih luas manajemen yang lebih baik dan sebagainya sehingga ada kenaikan produksi. External economies timbul adanya kenaikan produksi pada umumnya dan ada hubungannya dengan perkembangan pengetahuan dan kebudayaan. Jadi Marshall menekankan pada adanya sifat saling ketergantungan dan komplementer dari perekonomian. Mengenai kumulatifnya menurut Alien Young bahwa berkembangnya industri itu tergantung pada baiknya pembagian kerja diantara para buruh.

d. Optimis terhadap perkembangan ekonomi

Kaum klasik mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan macet karena keterbatasan sumber daya alam. Dipihak lain berpendapat bahwa adanya kemampuan manusia mengatasi keterbatasan pertumbuhan itu. Selalu akan ada kemajuan-kemajuan pengetahuan teknik secara gradual dan kontinyu dan akan selalu ada permintaan masyarakat, hal ini menimbulkan kemungkinan baru bagi buruh untuk kenaikan upah. Bagi Neo-klasik hal penting untuk pertumbuhan ekonomi ialah kemauan untuk menabung.

e. Aspek internasional perkembangan ekonomi tingkat perkembangan ekonomi:

- 1) Mula-mula Negara meminjam capital / impor capital.

- 2) Kemudian Negara peminjam tersebut setelah dapat menghasilkan dengan capital pinjaman tadi, membayar deviden dan bunga atas pinjaman tersebut.
- 3) Tingkat selanjutnya setelah penghasilan nasional Negara itu meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan itu digunakan untuk melunasi utang dan sebagian lagi dipinjamkan kenegara lain yang membutuhkan.
- 4) Tingkat keempat, Negara tersebut kemudian sudah menerima deviden dan bunga lebih besar dari pada yang dibayar, jadi ada surplus. Dengan kata lain untungnya semakin sedikit dan hutangnya semakin banyak.
- 5) Akhirnya Negara itu hanya selalu menerima deviden dan bunga saja dari Negara lain.

2. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya yang berbahasa Jerman pada tahun 1911 yang pada tahun 1934 diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Kemudian dia mengulas teorinya lebih dalam mengenai proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle*. Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan (*Satagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat. Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan *output* masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs*). *Inovasi disini* bukan hanya berarti perubahan yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam

masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya.

3. Analisis post Keynesian

Ahli-ahli post-keynesian ialah mereka yang mencoba merumuskan perluasan teori keynes. post-keynesian memperluas sistem menjadi teori output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisa fluktuasi jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan ekonomi jangka panjang.

Dalam analisis ini persoalan yang penting ialah:

- A. Syarat yang diperlukan untuk mempertahankan perkembangan pendapat yang mantap (*steady growth*) pada tingkat pendapatan dalam kesempatan kerja penuh (*full employment income*) tanpa mengalami deflasi atau inflasi.
- B. Apakah pendapatan itu benar-benar bertambah pada tingkat sedemikian rupa sehingga dapat mencegah terjadinya kemacetan yang lama atau terus menerus.

4. Teori Harrod-Domar

Pada hakikatnya teory Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teory makro Keynes. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena mengungkapkan masalah – masalah ekonomi dalam jangka panjang. Sedangkan teory Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teory ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar suatu perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan mantab. Menurut teory Harrod-Domar, pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan

ekonomi. Pembentukan modal tersebut dapat diperoleh melalui proses akumulasi tabungan.

Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional. mempunyai beberapa asumsi yakni :

- A. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan faktor – faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh .
- B. Perekonomian terdiri dari dua sector : sector rumah tangga dan sector perusahaan.
- C. Besarnya tabungan masyarakat proposional dengan besarnya pendapatan nasional.
- D. Kecenderungan menabung besarnya tetap.

5. Teori Evsey D. Domar

Karena investasi menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan, maka seberapa tingkat kenaikan investasi sama dengan kenaikan pendapatan dan kapasitas produksi diperlukan anggapan-anggapan teori sebagai berikut:

- A. Perekonomian sudah ada dalam pengerjaan tingkat penuh (*full employment income*)
- B. Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri
- C. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*)
- D. Hasrat menabung marginal dan hasrat menabung rata-rata sama.
- E. *Marginal propensity to savedan Capital coeffisien* adalah tetap.

Dari teori ini dinyatakan bahwa kenaikan investasi akan menaikkan kapasitas produksi dan pendapatan. Perekonomian kenyataannya menghadapi masalah yaitu bila investasi hari ini tidak cukup maka akan terjadi pengangguran.

Bila ada investasi hari ini maka besok diperlukan investasi yang lebih banyak untuk menaikkan permintaan sehingga kapasitas produksi bertambah.

6. Teori Harrod

Harrod menyoediki keadaan perkembangan ekonomi secara terus-menerus dan cara untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa tabungan sama dengan investasi ($GC=IS$) dimana G adalah tingkat pertumbuhan output atau perbandingan antara naiknya income dan total income pada waktu tertentu. C adalah tambahan kapital atau perbandingan antara investasi dan kenaikan pendapatan (I/DY) dan S adalah tabungan. Investasi dan pendapatan harus tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang mantap untuk mempertahankan pengerjaan penuh dalam jangka panjang.

Kelemahan teori Harrod-Domar adalah teori menggunakan asumsi yang sulit. Faktor-faktor penting seperti hasrat menabung dan rasio kapital output dianggap tetap, sedangkan kenyataan pada jangka panjang faktor tersebut berubah-ubah yang akan mengubah syarat yang dibutuhkan untuk adanya pertumbuhan ekonomi.

7. Teori Stagnasi Sekular (*Secular Stagnation*)

Stagnasi sekuler menunjukkan suatu fase perkembangan kapitalis yang telah masak dimana tabungan bersih pada tingkat full employment cenderung bertambah, sedangkan investasi bersihnya menurun. Ini menandakan kecenderungan jangka panjang menuju pada pengurangan kegiatan ekonomi. perumusan sebab-sebab stagnasi sekuler adalah:

- A. Menitik beratkan pada peranan faktor faktor eksogen seperti teknologi, perkembangan penduduk, pembukaan dan perkembangan daerah

baru. Menurut A. Hansen, perkembangan penduduk yang cepat, pembukaan daerah baru dan kemajuan teknologi akan mendorong investasi dan menaikkan pendapatan. Menurut Keynes, perkembangan penduduk akan mendorong kenaikan ekonomi, menaikkan daya beli dan dapat memperluas pasar. Tertundanya perkembangan penduduk mengakibatkan akumulasi kapital relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja.

- B. Menitik beratkan pada perubahan-perubahan dasar di dalam lembaga-lembaga sosial seperti meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dan perkembangan organisasi buruh.
- C. Menitik beratkan pada faktor-faktor endogen seperti perkembangan persaingan dan konsentrasi-konsentrasi perusahaan dalam industri.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat teknologi yang digunakan (Kuncoro, 2004).

Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.

Menurut Todaro (2003), Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ketahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa alat pengukur dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto apabila ditingkat nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik bruto per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk dalam skala daerah.

Model pertumbuhan ekonomi neoklasik yang dikemukakan oleh Solow menyatakan bahwa persediaan modal dan angkatan yang bekerja dan asumsi bahwa produksi memiliki pengembalian konstan merupakan hal-hal yang mempengaruhi besarnya output. Model pertumbuhan Solow juga dirancang untuk mengetahui apakah tingkat tabungan, stok modal, tingkat populasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi Mazhab Klasik

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Adam Smith merupakan salah satu tokoh klasik yang menggagas mengenai teori ekonomi, termasuk teori pertumbuhan ekonomi. Adam Smith

berpendapat bahwa proses pertumbuhan ekonomi terdiri dari dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan ekonomi.

a) Pertumbuhan Output Total

Terdapat tiga unsur pokok dalam sistem produksi yaitu :

1. Tersedianya sumber daya alam yang menjadi batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Apabila sumber daya manusia yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal, maka jumlah penduduk dan persediaan barang modal yang tersedia akan ikut berperan dalam pertumbuhan output. Namun, jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara maksimal, maka pertumbuhan output tersebut akan terhenti.
2. Sumber daya manusia (jumlah penduduk) dalam proses pertumbuhan output akan beradaptasi dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.
3. Persediaan barang modal termasuk dalam unsur produksi sebagai penentuan tingkat output dan berperan dalam proses pertumbuhan output. persediaan barang modal berpengaruh terhadap tingkat output total.

Adam Smith berpendapat bahwa jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot dan akibatnya akan mengurangi semangat para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal dan dalam jangka panjang tingkat keuntungan akan menurun

b) Pertumbuhan Penduduk

Adam Smith mengemukakan pendapatnya bahwa jumlah penduduk akan meningkat apabila standar upah yang berlaku lebih tinggi dan standar upah subsisten. Adam Smith juga berpendapat bahwa tingkat upah yang tinggi dan meningkat apabila cepatnya pertumbuhan akan permintaan tenaga kerja daripada penawaran tenaga kerja. Namun persediaan barang modal dan tingkat output masyarakat sebagai penentu permintaan akan tenaga kerja.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo

Garis besar pertumbuhan ekonomi David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori yang dikemukakan Adam Smith yaitu bahwa proses pertumbuhan masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Salah satu ciri perekonomian David Ricardo yaitu bahwa akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk investasi. Gagasan dari David Ricardo mengenai pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal yaitu *the law of diminishing return*. Gagasan ini berisi tentang bagaimana penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah sebagaimana penurunan produk maginal karena terbatasnya jumlah tanah sehingga mempengaruhi pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja.

B. Teori Pertumbuhan Mazhab Neo Klasik

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert M. Solow

Teori pertumbuhan neo-klassik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Robert M.

Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan :

$$AY = f(AK,AL,AT)$$

Dimana :

AY : tingkat pertumbuhan ekonomi

AK : tingkat pertumbuhan sosial

AL : tingkat pertumbuhan penduduk

AT : tingkat pertumbuhan teknologi

Analisis Solow selanjutnya berbentuk formula matematik untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan bahwa faktor terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukanlah penambahan modal dan penambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

C. Teori Pertumbuhan Endogen

Mankiw (2006) Teori pertumbuhan endogen yaitu teori yang menolak asumsi model Solow tentang perubahan teknologi yang berasal dari luar (eksogen). Kita mulai dengan fungsi produksi sederhana ;

$$Y = AK,$$

Di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan pertumbuhan Solow. Bagaimana fungsi

produksi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, diasumsikan bahwa sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Karena itu kita jelaskan akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya .

$$\Delta K = sY - \delta K$$

Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal (ΔK) sama dengan investasi (sY) dikurangi depresiasi (δK). Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi $Y = AK$, kita dapatkan : $\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta$. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output $\Delta Y/Y$, lihatlah selama $sA > \delta$, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang 55 pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya dalam pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.

Namun, penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan yang kian menurun) lebih bermanfaat jika K diasumsikan secara lebih luas. Barangkali kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal.

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda (Musgrave & B Musgrave, 1993).

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut :

1. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan

pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

2. Wagner

Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 1993; 170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Berikut adalah Hukum Wagner :

Formula Hukum Wagner
(Mangkoesoebroto, 1993; 170)

$$\frac{PkPPP1}{PPK1} \quad \frac{PkPPP2}{PPK2} \quad \dots \quad \frac{PkPPPn}{PPKn}$$

Keterangan:

PPP : Pengeluaran Pemerintah Perkapita

PPK : Pendapatan Perkapita, yaitu GDP/Jumlah Penduduk

1,2,...n : Jangka Waktu (Tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar berikut dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

3. Peacock dan Wiseman

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Dalam kondisi tidak

normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.

Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelum perang.

Dalam Mangkoesoebroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

2.1.4. Regulasi

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kab/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala Desa. Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap Desa berdasarkan jumlah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing Desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. (www.kemendes.go.id).

2.1.3.1. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60%;
2. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh Pemda diteruskan ke masing - masing Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa di RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
2. Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
3. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala KPPN menerima :

1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD;
2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I dari bupati/walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50%. Capaian *output* paling kurang sebesar 50% dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

2.1.3.2. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

a. Pasal 21

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

b. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

c. Pasal 23

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

d. Pasal 24

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

e. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (www.kemendes.go.id).

2.1.3.3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat, kemudian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan

keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai ialah keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi syarat yaitu tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Mekanisme pendataan : (1) pendataan dilakukan oleh relawan desa lawan covid-19 dengan formulir terlampir, (2) basis pendataan di RT dan RW, (3) musyawarah desa khusus yang dilaksanakan dengan agenda tunggal : validasi, finalisasi, dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa, (4) legalitas dokumen penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa, (5) pengesahan oleh Bupati/Walikota atau dapat diwakilkan ke Camat dalam waktu selambat-lambatnya lima hari kerja pertanggal diterima. Metode perhitungan penyaluran : (1) Desa penerima Dana Desa < 800 juta mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 25% (2) Desa penerima Dana Desa 800 juta sampai 1,2 miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 30% (3) Desa penerima Dana Desa > 1,2 miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal 35%.

2.1.3.4. Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Menyusul Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dan mempertimbangkan

situasi dan kondisi terkini evaluasi desa tanggap COVID-19, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kriteria pelaksanaan padat karya tunai desa ; (1) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. (2) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD. (3) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari. (4) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD. (www.kemendes.go.id)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar, Sriniyati (2019), Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta	Metode Kuantitatif	Dana Desa, pembangunan Fisik, Kesejahteraan Masyarakat	Dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik, Dana desa memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
2.	Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, dan Annisa Nur Salam (2021), Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan	Pendekatan kualitatif dengan metode analisi deskriptif	Dana Desa, Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana masyarakat penerima bantuan sudah mendapatkan BLT Dana Desa, meskipun demikian implementasi kebijakan BLT Dana Desa masih memunculkan masalah selama proses pelaksanaannya.

3	Dianti lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F. Rorong (2018) , Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	Data Panel	Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Tingkat Kemiskinan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, Alokasi Dana Desa tidak signifikan secara statistik, terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
---	--	------------	--	---

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur dari suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam operasional. Yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah melakukan analisis studi deskriptif tentang perkembangan Dana Desa, Penyaluran Dana Desa dan IPD IDM Kabupaten Labuhan Batu.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Mudrajad Kuncoro (2013:198) menyimpulkan analisis deskriptif salah satu bentuk analisis adalah kegiatan menyimpulkan data mentah dan jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola.

Secara lebih spesifik, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kebijakan Dana Desa dimasa covid 19.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah: Dana Desa sebelum dan sesudah pandemi covid 19.

Tabel 3 1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasioanl	Sumber Data
Dana Desa	Dana yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembangunan desa dalam satuan milyar rupiah	Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi www.kemendesa.go.id
IDM	Indeks Desa Membangun	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi www.kemendesa.go.id
IPD	Indeks Pembangunan Desa	Badan Pusat Statistik https://www.bps.go.id/

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di rencanakan selama 4 bulan yaitu Agustus sampai November 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Data ini menggunakan kata-kata dan angka untuk menggambarkan fenomena yang diamati. Dan data kuantitatif berguna menambah data-data pendukung dalam penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh langsung dari hasil publikasi yang berasal dari *website-website* resmi, seperti Kementerian Desa Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI), dan menggunakan data dari berbagai sumber yang terkait.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Henke & Reitsch (Kuncoro, 2013) pengumpulan data umumnya berasal dari Data *internal* atau *eksternal* dan Data primer atau data sekunder. Data *internal* berasal dari organisasi tersebut ataupun dari *eksternal* yang bersal dari luar organisasi. Sedangkan, data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Di lain pihak, data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. (Kuncoro, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data (*Sekunder*) dengan melakukan pengambilan data yang berkaitan dengan Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kemendesa PDTT RI), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI). Kemudian Penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal dan melakukan observasi lapangan, serta teknik dengan membagikan kuesioner dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan kepada pemerintahan desa dan responden secara langsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi dengan menyajikan dalam bentuk

tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder, dan data primer bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu

4.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu daerah yang berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara. Kabupaten ini menempati area seluas 2.561,38 Km² yang terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 98 desa/kelurahan definitif. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu berada pada 10 41' – 2 0 44' Lintang Utara, 22' Bujur Timur dengan^o33' – 100^o99 ketinggian 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu selatan dan Padang Lawas Utara
- Sebelah Barat : Bebatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Riau

Menurut ketinggian tanahnya, Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari daerah dataran dan perbukitan. Wilayah datarannya terletak pada ketinggian 0-10 m dan 11-25 m di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan menurut kemiringan tanahnya, sebagian besar wilayahnya berada pada kemiringan antara 0-2% dan 2-15%, masing-masing seluas 612.178 ha (66,4%) dan 138.839 ha (15,1%).

Kondisi geologi Kabupaten Labuhanbatu secara umum didominasi oleh tekstur tanah halus seluas 550.194 ha (59,65%) dan tekstur tanah sedang seluas

241.766 ha (26,213%) dan kedalaman efektif antara 30 cm mencapai 359.972 ha (39,03%) dan sampai 60 cm mencapai 245.823 ha (26,65%).

Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 Kecamatan dimana Kecamatan Panai Tengah merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 483,74 km² dan Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 64,32 km².

Tabel 4.1 Luas Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu

Kecamatan	Luas Wilayah	
	Km ²	%
Bilah Hulu	293.23	11.45
Pangkatan	344.47	13.88
Bilah Barat	202.98	7.92
Bilah Hilir	430.83	16.82
Panai Hulu	276.31	10.79
Panai Tengah	483.74	18.89
Panai Hilir	342.03	13.35
Rantau Selatan	64.32	2.51
Rantau Utara	112.47	4.39
Labuhan Batu	2,561.38	100

Sumber : BPS Kabupaten LabuhanBatu

4.1.2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Labuhanbatu adalah sebanyak 499.982 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 195 jiwa per km². Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Rantau Utara yaitu sebanyak 97.467 jiwa dengan kepadatan penduduk 867 jiwa per km², sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Pangkatan sebanyak 38.229 jiwa dengan kepadatan penduduk 108 jiwa per Km².

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2021

Kecamatan			
	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk km ²	Rasio Jenis Kelamin
Bilah Hulu	64.949	221	103
Pangkatan	38.229	108	103
Bilah Barat	40.422	199	103
Bilah Hilir	60.094	139	104
Panai Hulu	38.359	139	105
Panai Tengah	41.767	86	106
Panai Hilir	43.300	127	106
Rantau Selatan	75.395	1172	101
Rantau Utara	97.467	867	100
Labuhan Batu	499.982	195	103

Sumber : BPS Kabupaten Labuhan Batu

Kecamatan Rantau Selatan merupakan kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 1.172 jiwa per km² dan Kecamatan Panai Tengah merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 86 jiwa per km². Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki sebesar 253.645 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 243.337 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103.

Tabel 4.3 Jenis Kegiatan Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Presentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
0	67.405	2.512	69.917	96.41
1	39.588	1.963	41.551	95.27
2	77.860	5.999	83.859	92.85
3	29.700	2.409	32.109	92.50
Jumlah/Total	214.533	12.883	227.436	94.34

Sumber : BPS Kabupaten Labuhan Batu

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Labuhan Batu lebih banyak yang memiliki kegiatan bekerja daripada penduduk yang pengangguran. Presentase penduduk yang bekerja terhadap jumlah angka angkatan kerja dapat dikatakan cukup baik. Hal ini disebabkan oleh tingkat presentase penduduk yang bekerja diatas 90% atau lebih tepatnya menyentuh angka 94.34%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2021 cukup rendah.

Tabel 4.4 Status Pekerjaan Utama Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	21.544	14.895	36.439
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	10.923	9.867	20.790
Berusaha dibantu buruh tetap	10.897	2.948	13.845
Buruh	71.257	26.942	98.199
Pekerja Bebas	17.356	35.36	20.892
Pekerja Keluarga	20.286	14.102	24.388
Total	142.263	72.290	214.553

Sumber : BPS Kabupaten Labuhan Batu

Status pekerjaan utama di Kabupaten Labuhan Batu didominasi oleh pekerjaan sebagai buruh dengan jumlah total sebanyak 98.199 dengan jumlah laki-laki sebanyak 71.257 dan perempuan sebanyak 26.942. Urutan kedua yaitu, status pekerjaan Berusaha sendiri dengan jumlah total sebanyak 36.439 dengan jumlah laki-laki sebanyak 21.5444 dan perempuan sebanyak 14.895. Sedangkan, urutan ketiga yaitu pekerja keluarga dengan jumlah 24.388 dengan jumlah laki-laki sebanyak 20.286 dan perempuan sebanyak 14.102.

4.1.3. Kondisi Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang memberikan petunjuk sejauh mana perkembangan dan struktur ekonomi suatu daerah dalam suatu kurun waktu. Berikut ini merupakan PDRB Kabupaten Labuhan Batu.

Tabel 4.5 PDRB 17 Sektor PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) (Milyar Rupiah)

PDRB 17 Sektor	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) (Milyar Rupiah)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5 992,49	6 338,59	6 783,62	7 000,44	7 441,51	7 985,20
Pertambangan dan Penggalian	151,05	159,07	166,08	164,04	178,78	189,6
Industri Pengolahan	6 947,28	7 280,81	7 483,84	7 438,07	7 676,76	7 930,50
Pengadaan Listrik dan Gas	16,42	16,65	17,37	18,3	18,86	20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,91	7,27	7,74	7,91	8,09	8,5
Konstruksi	1 761,88	1 782,93	1 896,09	1 787,63	1 841,07	1 852,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 422,13	3 641,44	3 877,14	3 822,73	3 948,19	4 148,50
Transportasi dan Pergudangan	367,88	391,79	419,09	410,28	406,28	441,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	305,11	317,97	332,13	320,69	320,16	344,4
Informasi dan Komunikasi	181,55	197,86	205,57	215,32	224,92	240,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	253,29	258,9	262,53	267,06	273,91	283,9
Real Estate	537,43	555,41	556,89	565,19	566,58	596,1
Jasa Perusahaan	33,84	35,26	36,09	36,37	36,14	37,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	579,96	607,66	642,02	641,84	644,36	643,8
Jasa Pendidikan	378,73	403,55	423,78	436,34	441,95	459,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92,01	96,11	100,07	98,7	97,42	100
Jasa Lainnya	20,21	21,07	22,66	21,84	22,57	24,2
Produk Domestik Regional Bruto	21 048,17	22 112,34	23 232,71	23 252,75	24 147,56	25 306,00

Sumber : BPS Kabupaten Labuhan Batu

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi paling besar pada struktur PDRB Kabupaten Labuhan Batu yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 dengan jumlah Rp. 7.985,20 Milyar rupiah. Urutan kedua di tempati oleh sektor industry pengolahan dengan jumlah Rp. 7.930,50 Milyar rupiah pada tahun 2022. Serta kontribusi paling

sedikit adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan jumlah sebesar Rp. 8,5 Milyar rupiah.

4.2. Analisis Penelitian

4.2.1. Perkembangan dana desa kabupaten Labuhanbatu

Pelaksanaan Dana Desa merupakan kelanjutan dari program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pemberdayaan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik. . Memajukan perekonomian, menghilangkan kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat sebagai tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan, melalui Pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 4.6 Perkembangan Dana Desa Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Dana Desa (Milyar)
1	2018	60.35
2	2019	69.96
3	2020	71.26
4	2021	74.48
5	2022	67.41

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa perkembangan Dana Desa di Kabupaten Labuhan Batu mengalami fluktuasi. Dimana, pada tahun 2018 – 2021 Dana Desa kabupaten Labuhan Batu mengalami peningkatan namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan. Besaran Dana Desa yang diterima Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2018 sebesar Rp. 60.35 Milyar, mengalami peningkatan pada

tahun 2019 menjadi Rp. 69.96 Milyar. Peningkatan tersebut terus terjadi hingga pada tahun 2021 anggaran Dana Desa yang didapatkan oleh Kabupaten Labuhan Batu mencapai Rp. 74.48 Milyar. Jika dilihat anggaran dana desa Kabupaten Labuhan Batu setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini disebabkan anggaran dana desa dari pemerintah pusat yang terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, pada tahun 2022 anggaran Dana Desa mengalami penurunan menjadi Rp. 67.41 Milyar.

Tabel 4.7 Alokasi Dana Desa per-Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Total Penyaluran ke RKD
1.	BILAH BARAT	10	Rp. 8.593.725.800
2.	BILAH HILIR	11	Rp. 10.236.690.400
3.	BILAH HULU	7	Rp. 16.670.185.900
4.	PANGKATAN	9	Rp. 6.565.196.800
5.	PANAI TENGAH	7	Rp. 8.996.445.600
6.	PANAI HILIR	7	Rp. 7.506.755.400
7.	PANAI HULU	7	Rp. 6.593.736.000
	TOTAL	75	Rp. 65.162.743.900

Sumber : Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa alokasi dana desa per Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan kecamatan Bilah Hulu merupakan kecamatan dengan total penyaluran dana desa paling tinggi diantara kecamatan lainnya dimana, jumlah penyalurannya sebesar Rp. 16.670.185.900. Urutan kedua ditempati oleh kecamatan Bilah Hilir dengan jumlah sebesar Rp. 10.236.690.400 dan kecamatan dengan alokasi paling rendah adalah kecamatan Pangkatan dengan jumlah alokasi sebesar Rp. 6.565.196.800.

Tujuan pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dengan mendorong pembangunan desa yang mandiri dan berkelanjutan yang

memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan antara desa dan kota dengan mempercepat pembangunan desa dan perkotaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Menurut Nawacita, butir ketiga “membangun Indonesia dari pingir dengan memberdayakan daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” diwujudkan dalam berbagai pendekatan untuk mengatasi ketimpangan. Kebijakan dasar desa diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi ketimpangan di pedesaan. Membangun dari desa merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

4.2.2. Penggunaan dan alokasi dana desa era pandemic covid-19

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dilaksanakannya Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pengelolaan Dana Desa tahun 2022 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022, Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa,

program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam; mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk:

1. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%;
2. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;
3. dukungan pendanaan penanganan Covid-2019 paling sedikit 8% dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
4. Program sektor prioritas lainnya.

Kecamatan Bilah Hulu dan Bilah Barat merupakan salah satu kecamatan yang mendapat alokasi dana desa lebih tinggi dari kecamatan lainnya. Berikut ini merupakan data penyaluran dana desa di Kabupaten Labuhan Batu

Tabel 4.8 Penyaluran Dana Desa di Desa Kabupaten Labuhan Batu 2022

No	Desa	Total Penyaluran RKD	Alokasi Covid-19	BLT Desa
Kecamatan BILAH HULU				
1.	N-8 AEK NABARA	Rp. 625.176.600	Rp. 254.784.400	Rp.97.200.000
2.	S-1 AEK NABARA	Rp. 731.535.000	Rp. 223.690.000	Rp. 158.400.000
Kecamatan BILAH BARAT				
3.	AEK BURU SELATAN	Rp. 688.795.800	Rp. 171.197.200	Rp. 172.800.000

Sumber: sid.kemendes.go.id

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Desa dan panduan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa, setiap desa memiliki kewajiban untuk mengalokasikan anggaran desanya pada program pemulihan ekonomi pasca covid-19. Dimana, dari data diatas terlihat bahwa desa N-8 AEK NABARA kecamatan Bilah Hulu mendapat anggaran desa sebesar Rp. 625.178.600 dimana, dari anggaran tersebut dialokasikan pada alokasi covid-19 sebesar Rp. 254.784.400 dan BLT Dana Desa sebesar Rp.97.200.000. Desa S-1 Aek Nabara kecamatan Bilah Hulu mendapatkan anggaran sebesar Rp. 731.535.000 dimana, sebesar Rp. 223.690.000 dialokasikan untuk Alokasi Covid-19 dan dana sebesar Rp. 158.400.000 dialokasikan untuk program BLT.

Pemerintah berupaya meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai ke desa (BLTDesa). Penerima bantuan langsung tunai telah melalui proses verifikasi dan disepakati dalam musyawarah khusus oleh perangkat Desa Rintis melalui agenda rapat penerima bantuan langsung tunai selama masa periode berjalan. Berdasarkan laporan Pengelola Keuangan, kriteria warga penerima BLT desa pasti miskin, kurang mampu, warga yang tidak mendapat bantuan dari negara, warga yang terkena dampak pandemi misalnya. PHK, setengah menganggur dan lain sebagainya.

Hal ini sejalan dengan Program Prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini yaitu program perlindungan sosial berupa BLT Desa. BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana Desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga

miskin desa, mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, serta menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Disamping itu, dalam rangka mendukung pendanaan penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya paling sedikit sebesar 8% dari pagu Dana Desa setiap desa. Besaran paling sedikit 8% tersebut di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.

4.2.3. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Pembangunan Desa (IPD) di Kabupaten Labuhan Batu

4.2.3.1. Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Labuhan Batu

Konsep Indeks Membangun Desa (IDM) sendiri kemudian dijelaskan dalam Peraturan Kementrian Desa (Permendes) No. 2 Tahun 2016 tentang pola dan peta pengembangan pembangunan desa. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa konsep IDM terintegrasi dari beberapa kategori di dalamnya yang meliputi: Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS). Dari ketiga faktor tersebut kemudian dijadikan sebagai referensi dalam proses pengukuran strata kemandirian dan kemajuan suatu desa.

Berdasarkan konteks tipologi desa, Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: “(i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri”. Dari kelima klasifikasi tersebut maka kini stratata desa sudah memiliki beberapa pembagian yang digunakan sebagai indikator atau parameter desa. Tipologi

pembagian Indeks Desa Membangun (IDM) dapat dibagi ke beberapa hal seperti: (1) desa sangat tertinggal: $< 0,491$; (2) desa tertinggal: $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang: $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju: $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri: $> 0,815$ ” (Suroso, 2019).

Tipologi ini sesuai dengan Permendes No. 6/2016 yang mengatur peta pembangunan desa. Pertama adalah desa sangat tertinggal atau desa tertinggal. Desa ini dicirikan dalam perkembangannya dengan beberapa konsep seperti : Pertama, pengembangan, perolehan dan pemeliharaan peluang pembangunan ekonomi, dan kedua, pengembangan kegiatan yang meliputi produksi, penjualan dan pemasaran. Selain itu, untuk mendukung pengelolaan ekonomi desa dapat dilaksanakan pembentukan usaha ekonomi kerakyatan melalui pengelolaan BUMDes sebagai milik desa.

Kedua adalah desa berkembang yang memiliki beberapa karakteristik meliputi: pembangunan serta pengembangan seluruh infrastruktur perekonomian mulai dari produksi, retribusi, dan pemasaran serta berusaha untuk dapat menjadi lumbu pangan dan usaha perekonomian masyarakat desa. Dalam hal pemeliharaan infrastruktur desa desa berkembang berusaha untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh desa hingga dapat melakukan pelayanan terhadap masyarakat desa. Untuk mendorong hal tersebut penguatan perekonomian desa didukung oleh BUMDes sebagai akses perekonomian mulai dari pemberian modal, pengelolaan usaha, proses distribusi, dan terakhir proses pemasaran yang kesemuanya dipandu oleh pemerintah desa dalam rangka membantu perekonomian dan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.

Ketiga adalah desa maju atau desa mandiri yang dicirikan sebagai sebuah desa yang memiliki baik itu pembangunan, pengembangan serta pemeliharaannya infrastruktur desa yang berbasis pada angka produktifitas yang difokuskan dalam sebuah produk unggulan. Proses pemberdayaan dan pemeliharaan infrastruktur didukung atas proses pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan ketahanan pangan bagi masyarakat desa. Pengelolaan aset desa didukung oleh produktifitas dari BUMDes yang berusaha untuk dapat melakukan suatu produksi, retribusi, dan pemasaran yang baik dan didukung oleh kualitas masyarakat desa dengan tujuan sebagai mata pencarian dan pengaktifan perekonomian masyarakat sekitar (Mohammad Soekarno, 2020).

Indikator desa membangun setidaknya ada 3 (tiga) dimensi yang dijelaskan di dalam Buku Indeks Desa Membangun Kemendes sebagai berikut:

- Dimensi Ketahanan Sosial : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Pemukiman.
- Dimensi Ketahanan Ekologi : Kualitas Lingkungan, Potensi rawan bencana dan Tanggap bencana.
- Dimensi Ketahanan Ekonomi : Keragaman produksi masyarakat desa, Tersedianya pusat perdagangan, Akses distribusi dan logistic, Akses ke lembaga keuangan, Lembaga ekonomi dan Keterbukaan wilayah.

Tabel 4.9 Perkembangan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2018 - 2022

Tahun	Nilai IDM	Status
2018	0.6120	Berkembang
2020	0.6524	Berkembang
2021	0.6524	Berkembang
2022	0.6748	Berkembang

Sumber : idm.kemendesa.go.id

Berdasarkan tabel di atas, secara umum kabupaten Labuhan Batu sejak tahun 2018 hingga 2022 status Indeks Desa Membangun (IDM) berada pada status Berkembang. Pada tahun 2018 nilai rata-rata IDM kabupaten Labuhan Batu sebesar 0.6120, pada tahun 2020 meningkat menjadi 0.6524 hingga pada tahun 2022 meningkat menjadi 0.6748.

4.2.3.2. Perkembangan Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada Kabupaten Labuhan Batu

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa-desa di Indonesia. Di Indonesia sendiri, percepatan pembangunan desa berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan adalah pembangunan embung, jalan desa, jembatan, pasar desa, penahan tanah, tambatan perahu, air bersih, drainase, saluran irigasi, hingga tempat mandi cuci kakus (MCK) dan sumur. Pembangunan juga mencakup aktivitas ekonomi sosial seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), pembangunan tempat olah raga desa, pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Polindes (Pondok Bersalin Desa), Posyandu (Pos Pelayanan Kesehatan Terpadu), serta infrastruktur lainnya. Hal tersebut konsisten dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) menjadi 5 (lima) dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan data/variabel dalam data Potensi Desa 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar yaitu mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.
2. Kondisi Infrastruktur yaitu mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ transportasi. Variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, dan pengiriman pos/barang.
3. Aksesibilitas/Transportasi yaitu dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi dalam desa. Variabelvariabel

penyusunnya meliputi ketersediaan dan akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati/ walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor bupati/walikota. Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2018, dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi suatu kawasan berada di sekitar/dekat pusat- pusat pemerintahan.

4. Pelayanan Umum yaitu upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada ketersediaan data Potensi Desa 2018. Aspek lingkungan dalam hal ini terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabelvariabel penyusun dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; serta ketersediaan fasilitas

olah raga seperti: ketersediaan lapangan olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan yaitu mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa tersebut. Variabel-variabel penyusunnya meliputi kemandirian seperti: kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan asset/kekayaan desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala desa dan sekretaris desa.

Berkaitan Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara beberapa tahun belakangan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2014 dan tahun 2018. Adapun Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 yakni, sebagai berikut:

Tabel 4.10 Dimensi Indeks Pembangunan Desa (IPD) Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2014 dan 2018

Tahun	IPD	Pelayanan Dasar	Kondisi Infrastruktur	Aksesibilitas/Transportasi	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Desa Menurut Status Desa			Jumlah Desa
							Tertinggal	Berkembang	Mandiri	
2014	60,34	64,08	44,46	76,86	57,26	58,13	12,00	85,33	2,67	75
2018	64,16	65,55	49,15	77,95	64,81	68,35	1,33	90,67	8,00	75

Sumber : Podes BPS, 2018

Berdasarkan table dimensi IPD kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai nilai 60,34 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 64,16. Kabupaten Labuhan Batu dengan jumlah desa sebanyak 75 desa

memiliki system pelayanan dasar mencapai taraf 65,55 dengan kondisi infrastruktur sebesar 49,15 serta tingkat Aksesibilitas/Transportasi sebesar 77,95 dan pelayanan umum memiliki taraf 64,81 serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan sebesar 68,35.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasna yang telah dilakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Dana Desa di Kabupaten Labuhan Batu mengalami perkembangan yang fluktuatif. Sejak tahun 2018 – 2021 besaran Dana Desa dana desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Pengalokasian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Labuhan Batu seperti pada desa N-8 Aek Nabara, S-1 Aek Nabara dan Aek Buru Selatang memfokuskan anggaran dana desa pada alokasi covid-19 dan BLT dana desa.
3. Kabupaten Labuhan Batu sejak tahun 2018 hingga 2022 status Indeks Desa Membangun (IDM) berada pada status Berkembang. Pada aspek Indeks Pembangunan Desa (IPD) kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara pada tahun 2014 mencapai nilai 60,34 dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 64,16.

5.2. Saran

1. Pemerintahan desa harus terbuka secara langsung dalam mengalokasikan dana desa.
2. Untuk mengembangkan suatu wilayah sebaiknya masyarakat juga ikut berperan penting, sehingga akan tumbuh kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafni, R., Sinulingga, N. S., & Hasibuan, L. S. (2021, November). Analisis Evaluasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Ketahanan Pangan di Era Pandemi (Studi Kasus Desa Simpang Empat, Kec. Simpang Empat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara). In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 1185-1198).
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan. *Jurnal Inspirasi*, 12(1), 1-16.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Mudrajad, K. (2013). Metode riset untuk bisnis dan ekonomi edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85-93.
- Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
- RS, P. H. (2018). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Indonesia: Peningkatan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Pada Provinsi Se-Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 1066-1086.
- Sadono, Sukirno. (2000), Makroekonomi Modern:Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru : Raja Grafindo Pustaka
- Siregar, H. P., & Hariani RS, P. (2021). *Evaluasi Kebijakan Dana Desa Pada Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Suroso, S. (2019). Eksistensi Pembangunan Masyarakat Dan Desa Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 15(2), 77-90.
- Tikson, T. Deddy. 2005. Administrasi Pembangunan. Makassar : Gemilang Persada
- Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (H.Munandar, Trans. Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Erlangga

- Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta
- Todaro, Michael. (2015). Pembangunan Ekonomi jilid 1. Jakaerta : Erlangga.